

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya (Therik, 2008). Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis yaitu, sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai macam biota, penahan abrasi pantai, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah interusi air laut, kemudian hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi seperti sebagai penyedia kayu dan obat-obatan. Selain itu hutan mangrove berfungsi sebagai habitat dari beberapa jenis satwa liar seperti burung, mamalia, reptilian dan amphi (Riska, 2010).

Luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 8,6 juta Ha yang terdiri atas 3,8 juta ha terdapat di kawasan hutan dan 4,8 juta Ha terdapat di luar kawasan hutan. Sementara itu, berdasarkan kondisi diperkirakan bahwa 1,7 juta Ha (44.73%) hutan mangrove di dalam kawasan hutan dan 4,2 juta Ha (87.50 %) hutan mangrove di luar kawasan hutan dalam keadaan rusak (Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dalam Bahagia, 2009).

Salah satu kawasan mangrove Indonesia terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Boalemo. Berdasarkan hasil analisis pada citra satelit, hutan mangrove hanya dijumpai di lima kecamatan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang

terbentang digaris pantai 173,03 Km. Hutan mangrove di kabupaten Bualemo seluas 1.436,04 Ha terbagi atas luas di dalam kawasan hutan 415,64 Ha dan luas di luar kawasan hutan 1020,4 Ha. Konversi hutan mangrove menjadi tambak di Kabupaten Boalemo dimulai sejak tahun 1980-an (Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo, 2010).

Kecamatan Dulupi terbagi ke dalam delapan desa dimana sebelah utara desa ini berbatasan dengan Kec. Wonosari dan timur berbatasan dengan Kec. Paguyaman; sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Talamuta. Kecamatan yang pada tahun 2008 berpenduduk 12.194 jiwa ini memiliki hutan mangrove seluas 365,57 Ha yang terbentang antara 122024'16.5688''-122030'33.0557''BT dan 0029'37.0767''- 0031'13.6351''LU dengan garis pantai sepanjang 33,97 Km. Dari total luas hutan mangrove, seluas 352,67 Ha masih merupakan areal berhutan sedangkan sisanya seluas 12,9 Ha sudah tidak berhutan lagi (Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo, 2010).

Salah satu penyebab degradasi hutan mangrove yang sangat menonjol adalah pembukaan lahan atau konversi hutan menjadi kawasan pertambakan. Selain konversi, degradasi hutan mangrove juga terjadi akibat pemanfaatan yang intensif untuk bahan bakar dan bahan bangunan. Lokasi terparah yang mengalami kerusakan mangrove di wilayah ini adalah di desa Dulupi. Menurut dinas kehutanan kabupaten Bualemo (2010), luas areal mangrove yang terdegradasi di kecamatan dulupi adalah 13,05 Ha, dimana areal yang mengalami degradasi hutan mangrove berada dikawasan desa Dulupi dengan luas areal kerusakan 9,52 Ha dan Desa Tabongo luas areal kerusakan hutan mangrove adalah 3,53 Ha.

Berdasarkan hasil penelitian persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove di desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung oleh Mustika (2012), penyebab rusaknya ekosistem mangrove di Desa Tinangkung adalah pemanfaatan kayu bakar dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan mangrove. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tuntutan untuk mendayagunakan sumberdaya mangrove terus meningkat. Ilmu pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh dalam memperbaiki ekosistem hutan mangrove, dari hasil wawancara sekitar 60% terlihat bahwa pemahaman masyarakat sangat rendah untuk memberikan informasi tentang hutan mangrove. Sebagian kecil yang mengetahui manfaat hutan mangrove, melihat perbedaan yang sangat jauh maka ada usaha yang dilakukan oleh aparat desa atau pemerintah untuk melakukan pelatihan atau sosialisasi yang menyangkut pelestarian hutan mangrove.

Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah tidak ada kebijakan yang jelas dalam pengawasan mengenai pemanfaatan lahan pesisir ditingkat desa, akibatnya mudah sekali mengkonversi mangrove untuk peruntukan lahan pesisir baik yang dilakukan oleh masyarakat, penguasa dan pengusaha. Permasalahan lain adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan mangrove yang masih rendah.

Berdasarkan data RPJM-Desa Dulupi (2013), Desa Dulupi mempunyai Jumlah Penduduk 3.950 Jiwa (1994 laki-laki dan 1956 Perempuan), terdiri dari 1391 KK. Penduduk ini tersebar dalam 6 wilayah dusun diantaranya yaitu, (1) Dusun Jambura (jumlah penduduk 757 terbagi atas 383 laki-laki dan 374

perempuan), (2) Dusun Teratai (jumlah penduduk 799 terbagi atas 391 laki-laki dan 408 perempuan), (3) Dusun Sambati (jumlah penduduk 527 terbagi atas 281 laki-laki dan 246 perempuan), (4) Dusun Batu Potong (jumlah penduduk 1024 terbagi atas 506 laki-laki dan 518 perempuan), (5) Dusun Langge (jumlah penduduk 426 terbagi atas 222 laki-laki dan 203 perempuan), (6) Dusun Huata (jumlah penduduk 418 terbagi atas 211 laki-laki dan 207 perempuan). Tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulupi yaitu, SD (531 orang), SMP (291 orang), SLTA (252 orang), Diploma (35 orang), Sarjana (25 orang).

Kawasan hutan mangrove di Desa Dulupi kecamatan Dulupi kabupaten Boalemo merupakan sebagian wilayah sebaran tumbuhan mangrove yang ada di Kabupaten Bualemo. Namun pada saat ini kawasan hutan mangrove yang rusak atau dialih fungsikan menjadi tambak adalah 9,52 Ha, di Desa Dulupi ada beberapa tambak yang dibuat oleh masyarakat setempat, namun sekarang tambak tersebut sudah ditanami kembali. Penanaman dilaksanakan oleh pemerintah setempat, informasi dari masyarakat sekitar bahwa tanaman mangrove yang di tanami pada kawasan tambak sudah berumur 3-4 tahun.

Dalam mengatasi degradasi ini maka pemerintah setempat beserta masyarakat yang sadar akan pentingnya hutan mangrove melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi awal hutan mangrove. Kegiatan rehabilitasi ini untuk mengembalikan kondisi awal hutan mangrove dengan jenis mangrove yang di tanami adalah *Rhizophora* sp. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang aktivitas rehabilitasi hutan mangrove di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo maka penelitian

tentang “Persepsi dan Respon masyarakat Terhadap Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo” dapat dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap rehabilitasi hutan mangrove di desa Dulupi?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap rehabilitasi hutan mangrove di desa Dulupi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap rehabilitasi hutan mangrove di Desa Dulupi.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap rehabilitasi hutan mangrove di Desa Dulupi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti serta meningkatkan wawasan tentang karakter masyarakat yang berada di lingkungan mangrove.
2. Untuk pendidikan sebagai bahan referensi serta sebagai sumber bacaan untuk lebih mengetahui karakter masyarakat dalam menangani hutan mangrove.

3. Untuk masyarakat sebagai salah satu bahan bacaan agar lebih memahami bagaimana pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove.
4. Bagi pemerintah dapat memberikan informasi bagaimana repon masyarakat pesisir dalam pelestarian hutan mangrove dan sebagai acuan dalam program pemerintah untuk pelestarian kawasan mangrove khususnya di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.